



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VI DPR RI
BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN
INVESTASI**

Rapat ke	:	5 (<i>lima</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Biofarma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk, dan PT. Indofarma Tbk.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 25 Mei 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 Dilaksanakan secara <i>offline</i> dan <i>online</i>
A c a r a	:	1. Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Pemalsuan Antigen dan 2. Progres Pengadaan Vaksin Covid-19;
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. Biofarma (Persero) beserta jajaran; 3. Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk. beserta jajaran dan; 4. Direktur Utama PT. Indofarma Tbk. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Biofarma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk, dan PT. Indofarma Tbk. (Persero) pada pukul 14.08 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 25 Mei 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Aria Bima, Wakil Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk terkait tindak lanjut penyelesaian kasus pemalsuan antigen dengan melakukan lima langkah pembenahan antara lain : Restrukturisasi Organisasi, Penguatan Sistem Layanan Digital, Sinergi dengan *Stakeholder*, Audit Sistem Pengawasan Internal dan *Quality Assurance Officer*.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Bio Farma (Persero) untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk memfungsikan gedung eks fasilitas flu burung.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada orang yang mengalami efek samping akibat vaksin.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk untuk memperhatikan kasus India dan Malaysia yang meningkat akibat varian baru agar memperhatikan efektifitas vaksin yang sudah disepakati.
5. Terkait vaksin gotong royong, Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN farmasi untuk memastikan harga vaksin yang transparan dan akuntabel serta lokasi pelayanan vaksinasi tidak tumpang tindih dengan program vaksinasi gratis pemerintah.
6. Komisi VI DPR RI meminta jaminan kepada PT. Bio Farma (Persero) agar vaksin Sinovac dapat sertifikasi WHO dan pemerintah untuk melakukan negosiasi bersama Pemerintah Arab Saudi agar dapat memastikan bahwa jama'ah haji dari Indonesia dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk untuk melaporkan progress penggunaan PMN yang di terima BUMN Farmasi Tahun Anggaran 2021, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 sebagai dasar untuk penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 disampaikan secara tertulis.
8. Komisi VI DPR RI mendorong holding Farmasi bersama lembaga/instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BPOM dan LPOM-MUI agar mempercepat pengadaan vaksin *Covid-19* sehingga dapat meminimalisir penyebaran Virus *Covid-19* dan memulihkan perekonomian.

9. Komisi VI DPR RI meminta PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi vaksin Covid-19 di masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan dalam kegiatan vaksinasi nasional.
10. Komisi VI DPR RI meminta PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

1. Sebagai bahan rapat dengan Kementerian BUMN agar dilakukan audit kinerja oleh BPK
2. Untuk melakukan optimalisasi dengan pemerintah Arab Saudi
3. Agar GNose sebagai pengganti swab antigen diberlakukan di seluruh Bandara tanpa harus ada pembatasan kuota untuk menghidupkan bisnis penerbangan dan sektor Pariwisata.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.03 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



ARIA BIMA *tr*
A-189